

PERBANDINGAN EKOSOSPOL DAN KEAMANAN DALAM IMPLEMENTASI
PANCASILA PADA MASA ORDE BARU DAN REFORMASI

Muhammad Damar Setyo Kumoro, Irwan Triadi

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
2310611176@mahasiswa.upnvj.ac.id, irwantriadi1@yahoo.com**Abstrak**

Jurnal ini membahas perbandingan kebijakan dan dampaknya pada berbagai aspek pembangunan antara era Orde Baru dan Reformasi di Indonesia. Pada era Orde Baru, kebijakan sentralistik berfokus pada stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, meski sering mengorbankan hak asasi manusia. Sebaliknya, era Reformasi ditandai dengan desentralisasi, penguatan demokrasi, dan peningkatan penghormatan terhadap HAM, meskipun dihadapkan pada tantangan seperti fragmentasi politik, konflik sosial, dan ketimpangan pembangunan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan analisis peraturan perundang-undangan serta teori yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun Reformasi membawa kebebasan dan demokrasi yang lebih baik, pelaksanaannya masih menghadapi banyak kendala dalam aspek pemerataan, kualitas pendidikan politik, dan efektivitas tata kelola pemerintahan. Artikel ini menekankan pentingnya kebijakan yang berkelanjutan dan inklusif untuk menjawab tantangan di masa mendatang.

Kata Kunci: Orde Baru, Reformasi, kebijakan publik, hak asasi manusia, demokrasi, desentralisasi, pembangunan, tata kelola pemerintahan.

Abstract

This journal discusses the comparison of policies and their impacts on various aspects of development between the New Order and the Reform Era in Indonesia. During the New Order, centralized policies focused on political stability and economic growth through infrastructure development, often at the expense of human rights. Conversely, the Reform Era emphasized decentralization, strengthening democracy, and improving respect for human rights, despite challenges such as political fragmentation, social conflicts, and developmental disparities. This study employs a normative juridical method with an approach to analyzing relevant laws and theories. The findings reveal that although the Reform Era brought greater freedom and democracy, its implementation still faces significant challenges in equity, political education quality, and governance effectiveness. This article highlights the importance of sustainable and inclusive policies to address future challenges.

Keywords: *New Order, Reform Era, public policy, human rights, democracy, decentralization, development, governance.*

Article HistoryReceived: Desember 2024
Reviewed: Desember 2024
Published: Desember 2024Plagiarism Checker No
234.54757hPrefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365**Copyright : Author**
Publish by : CAUSAThis work is licensed
under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)**PENDAHULUAN****Latar Belakang**

Setiap era kepemimpinan akan menimbulkan kesan tersendiri. Hampir tidak mungkin era kepemimpinan satu pemimpin dengan pemimpin lainnya memiliki luaran yang sama, pasti ada perbedaan. Hal ini disebabkan oleh berbagai aspek, seperti pandangan ideologis sang pemimpin,

perubahan zaman, kondisi masyarakat yang berbeda, keadaan geopolitik dunia yang berubah, dan lain sebagainya. Di buku pelajaran Indonesia sendiri, kita tahu bahwasanya Indonesia terbagi menjadi beberapa era, yaitu era awal kemerdekaan, kemudian era Republik Indonesia Serikat (RIS), dilanjut era Demokrasi Liberal, Demokrasi Terpimpin atau Orde Lama, diganti era Orde Baru, dan terakhir era Reformasi. Namun, artikel ini akan mengerucut pada Perbandingan Orde Baru dan Reformasi. Sebetulnya, era Reformasi tidak dapat digeneralisir atau dipukul rata bahwa semua kepemimpinan sama. Tercatat sudah 5 kali pergantian Presiden Reformasi dari era Bacharuddin Jusuf Habibie dan yang terbaru ketika artikel ini dibuat adalah Prabowo Subianto. Jelas setiap pergantian pastinya akan ada perubahan signifikan.

Pada masa Orde Baru, pemerintah berfokus pada pembangunan ekonomi dan stabilitas politik, dengan kebijakan sentralistik yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Kelebihan dari masa ini terletak pada pembangunan infrastruktur dan program pendidikan yang masif, hal ini dapat kita lihat dari beberapa programnya, salah satunya termasuk program P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila), yang bertujuan untuk membentuk kesadaran ideologis di kalangan masyarakat. Namun, hal ini dilakukan dengan mengesampingkan hak asasi manusia (HAM). Kebebasan berpendapat dibatasi, dan tindakan represif dilakukan untuk menjaga stabilitas politik serta menekan oposisi.¹

Sebaliknya, era Reformasi ditandai dengan peningkatan penghargaan terhadap HAM dan demokrasi, termasuk kebebasan pers dan politik. Sistem demokrasi yang lebih terbuka memberikan ruang bagi kebebasan berpendapat, namun penerapannya sering kali tidak konsisten. Meski lebih menjunjung HAM, sistem demokrasi ala liberal yang diterapkan di sisi lain dapat dikatakan kurang cocok bagi Indonesia, yang mayoritas masyarakatnya masih berpendidikan rendah. Hal ini menyebabkan lemahnya kualitas pendidikan politik dan kesadaran masyarakat, sehingga demokrasi seringkali dimanfaatkan oleh elit politik tanpa pemahaman yang cukup dari masyarakat.² Ditambah lagi dengan kebebasan lebih yang diberikan, membuat masyarakat dapat menghakimi masyarakat lainnya, hal ini terlihat dari kejadian pasca-reformasi, di mana banyak konflik antarsuku.³

Tak lepas sampai di situ saja, masih banyak sektor lain yang dapat kita bandingkan dan kita bedah kelebihan dan kekurangan di masing-masing era kepemimpinan. Tulisan ini akan membahas dari segi ekosospol (ekonomi, sosial, politik) dan keamanan. Dari segi sosial dan politik, nantinya akan bersinggungan dengan aspek lain seperti budaya dan pendidikan.

Adapun penulisan-penulisan terdahulu mengenai perbandingan era orde baru dan reformasi yang berhasil penulis temukan sebagai berikut: Pertama, Sagita, Risa Dewi, Munadiyatul Khoiroh, Vara Dwi Ayunita Ningrum, Wahyu Suhaimi, dan Galang Febriansyah dalam karya ilmiahnya yang berjudul "Studi Perbandingan Upaya Pemberantasan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi pada Era Orde Baru dan Reformasi".

Dalam karya ilmiah ini membahas perbandingan upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan pemerintah orde baru dengan pemerintah era reformasi, guna mengupas segi keamanan dan stabilitas politik dari perspektif penegakan hukum.⁴ Kedua, Sunarto dalam karya ilmiahnya yang berjudul "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR (Perbandingan Antara Era Orde Baru dan Era Reformasi)".

Dalam karya ilmiah ini membahas bagaimana peran DPR di kedua era yang cenderung berbeda jauh. Di mana pada era orde baru, DPR sangat berkompromi politik terhadap kebijakan

¹Annisa. (2023, Oktober 5). *Penerapan Pancasila Pada Masa Orde baru ,Kelebihan dan Kelemahannya*. Fakultas Hukum UMSU. <https://fahum.umsu.ac.id/penerapan-pancasila-pada-masa-orde-baru-kelebihan-dan-kelemahannya/>

² Pusat Data dan Informasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila . (2021, April 15). *Penerapan Pancasila dari Masa ke Masa*. BPIP - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. <https://bpip.go.id/artikel/penerapan-pancasila-dari-masa-ke-masa>

³ Hadi, S., Widjajanto, A., Utomo, R. P., Rochayati, N., Supriyanto, A., S. M., & Addinata, W. (2007). *Disintegrasi Pasca Orde Baru: Negara, Konflik Lokal dan Dinamika Internasional*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia., 2007. https://perpustakaan.komnasperempuan.go.id/web/index.php?p=show_detail&id=1216

⁴ Sagita, R. D., Khoiroh, M., Ningrum, V. D. A., Suhaimi, W., & Febriansyah, G. (2024). STUDI PERBANDINGAN UPAYA PEMBERANTASAN DAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI PADA ERA ORDE BARU DAN REFORMASI. *Jurnal Hukum Dan Kebijakan Publik*, 6(3).

pemerintah, sementara pada era reformasi, DPR dapat lebih berperan dalam menggunakan haknya yaitu hak angket dan hak interpelasi.

Walau dalam penerapannya terkadang tidak ditindaklanjuti dan terkadang hanya untuk memenuhi kepentingan politik sesaat. Ditambah DPR lebih patuh terhadap perintah ketua partai. Namun, secara keseluruhan DPR di era reformasi jauh lebih dapat menerapkan prinsip check and balances agar menghindari kesewenangan kekuasaan oleh Pemerintah Eksekutif.⁵ Studi ini juga mendukung analisis stabilitas politik dan tata kelola negara yang berhubungan dengan bidang ekosospol (ekonomi sosial politik) dan keamanan.

Ketiga, Kanal YouTube Inspect History, dalam videonya yang berjudul "Kelebihan dan Kekurangan Pemerintah Orde Baru". Dalam video tersebut menyoroti beberapa kelebihan yaitu pembangunan orde baru yang pesat, kriminalitas rendah, Indonesia yang relatif aman dan politik stabil, harga bahan pokok terjangkau dan stok memadai. Di samping itu orde baru juga memiliki kekurangan seperti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang merajalela, kurangnya penegakan Hak Asasi Manusia, utang negara yang membengkak, dan pembangunan pesat terbatas di Pulau Jawa, bahkan cenderung spesifik di Jakarta saja.⁶

Keempat, Pujiati, dalam karya ilmiah yang berjudul "Perbandingan Dinamika Penggunaan Jilbab di Masa Orde Baru dan Reformasi". Dalam karya ilmiah ini membahas bagaimana pemerintahan orde baru menekan siswi yang menggunakan jilbab di sekolah negeri. Pilihannya hanya dua, lanjut bersekolah di sekolah negeri namun melepas jilbabnya, atau mengenakan jilbab namun pindah ke sekolah swasta. Penelitian ini menambahkan dimensi dari segi sosial budaya yang berkaitan dengan perubahan kebijakan dan kebebasan ekspresi di era Reformasi, sebagai kontra dari kontrol ketat pada Orde Baru.⁷

Kelima, Irshal Fansuri Mursal dan Gusmira Wita, dalam karya ilmiah yang berjudul "Majalah Sabili: Transisi Orde Baru ke Reformasi (1985-2000)". Dalam karya ilmiah ini membahas contoh kasus dari bagaimana perbedaan pemerintahan era Orde Baru dan era Reformasi yang memberikan pengaruh besar terhadap redaksi yang dikeluarkan media cetak Majalah Sabili. Majalah ini seringkali dibredel oleh Pemerintah Orde Baru karena dianggap frontal. Hal ini jelas berubah secara drastis di masa Reformasi, setelah diundangkannya Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pada masa Presiden Habibie, yang sangat mendukung keterbukaan pers.⁸

Sedangkan dalam tulisan ini, penulis mengkaji lebih dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat menjadi media pembanding antara orde baru dan reformasi. Di antaranya, Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang (UU) Nomor 26 Tahun 1999 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 11/PNPS/Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi.

Selain itu, Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi.

Serta yang terakhir, penulis menggunakan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No. 052/C/Kep/D/1982 tentang Pedoman Pakaian Seragam Sekolah di Siswa Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah

⁵ Sunarto. (2018, Januari 1). PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DPR (Perbandingan antara Orde Baru dan Reformasi). INTEGRALISTIK, 29(1), 84 - 96. <https://journal.unnes.ac.id/nju/integralistik/article/view/14604/7848>

⁶ Inspect History (ID). (2023). Kelebihan dan Kekurangan Pemerintahan Orde Baru! [Video]. Di *YouTube*. <https://www.youtube.com/watch?v=hKz6t2bJ3GY>

⁷ Pujiati, P. (2023). Perbandingan Dinamika Penggunaan Jilbab di Masa Orde Baru dan Reformasi. *Jurnal Sejarah Indonesia*, 6(2), 135-149. <https://doi.org/10.62924/jsi.v6i2.32604>

⁸ Mursal, I. F., & Wita, G. (2021, Februari). MAJALAH SABILI: TRANSISI ORDE BARU KE REFORMASI (1985-2000). MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial, 5(1), 111 - 122. : <https://doi.org/10.30743/mkd.v5i1.3503>

Menengah Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Tingkat Atas dalam Lingkungan Pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai obyek penelitian terkait orde baru.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari pendahuluan di atas, maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perbedaan kebijakan ekonomi, sosial, dan politik antara era Orde Baru dan era Reformasi memengaruhi pembangunan dan stabilitas Indonesia?
2. Sejauh mana penerapan hak asasi manusia (HAM) dan prinsip-prinsip demokrasi di era Reformasi memberikan dampak positif dan tantangan bagi stabilitas sosial dan politik di Indonesia?
3. Apa saja faktor yang menyebabkan perbedaan dalam pendekatan keamanan nasional antara Orde Baru dan Reformasi, dan bagaimana hal ini memengaruhi keamanan dan konflik sosial di masyarakat?

Metode Penelitian

Metode penelitian yuridis normatif dilakukan dengan pendekatan melalui kajian peraturan perundang-undangan, teori-teori, serta konsep-konsep yang berkaitan dengan isu yang menjadi fokus penelitian. Proses pemilihan sampel adalah langkah untuk menentukan bagian yang mewakili keseluruhan populasi secara representatif.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbedaan Kebijakan Ekonomi, Sosial, dan Politik antara Era Orde Baru dan Era Reformasi Memengaruhi Pembangunan dan Stabilitas Indonesia

Kebijakan ekonomi era Orde Baru dan Reformasi memiliki perbedaan mendasar yang memengaruhi pembangunan serta stabilitas nasional. Pada masa Orde Baru, kebijakan ekonomi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi melalui stabilitas politik dan sentralisasi kekuasaan. Pemerintah berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan rata-rata 7% per tahun di tahun, didukung oleh program industrialisasi, pembangunan infrastruktur, dan eksploitasi sumber daya alam. Namun, pembangunan sering kali tidak merata karena sentralisasi hanya menguntungkan kelompok tertentu, serta berujung pada ketimpangan ekonomi dan sosial.¹⁰

Sementara itu, pada era Reformasi, kebijakan ekonomi berfokus pada desentralisasi dan perbaikan tata kelola akibat krisis ekonomi 1997-1998. Pemerintah mendorong reformasi struktural dengan memperkuat otonomi daerah, memperbaiki regulasi keuangan, dan meningkatkan transparansi untuk menarik investasi asing. Pada era transisi orde baru ke reformasi, yaitu di era Presiden Habibie, Habibie dihadapkan pada tantangan besar, terutama dalam memulihkan ekonomi Indonesia yang hancur serta mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Untuk mengatasi krisis tersebut, pemerintah Habibie menerapkan berbagai langkah strategis. Di sektor moneter, dilakukan pengendalian peredaran uang, peningkatan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) hingga 70%, dan pemberian kewenangan independen bagi bank sentral. Di sektor perbankan, pemerintah mengeluarkan obligasi senilai Rp 650 triliun untuk menyelamatkan perbankan, menutup 38 bank, serta mengambil alih tujuh bank lainnya. Dalam bidang fiskal, beberapa proyek infrastruktur dibatalkan, kebijakan khusus untuk mobil nasional dihentikan, dan program Jaring Pengaman Sosial dibiayai. Sementara itu, di sektor korporasi, utang swasta direstrukturisasi melalui Indonesian Debt Restructuring Agency (INDRA) dan Prakarsa Jakarta, serta monopoli yang dilakukan Bulog dan Pertamina dihapuskan.

Meskipun situasi politik, hukum, dan keamanan saat itu penuh ketidakpastian, pemerintah harus mengambil keputusan cepat meski berisiko tinggi. Habibie menyebut

⁹ Soekanto, S. (2010). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.

¹⁰ Investments, I. (2024, December 7). Indonesia Keajaiban Orde Baru - Presiden Suharto. Indonesia Investments. <https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/ekonomi/keajaiban-orde-baru/item247>

pendekatannya berdasarkan pertimbangan "approximately" untuk mencapai solusi terbaik di tengah kondisi sulit.

Hasil dari kebijakan-kebijakan tersebut mulai terlihat satu tahun kemudian. Nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS yang sempat anjlok dari Rp 7.000 menjadi Rp 17.000, mulai stabil. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya -13% berhasil meningkat menjadi 2%, dan tingkat inflasi yang sempat mencapai 77,6% turun drastis menjadi 2%. Ini menjadi batu pondasi yang kuat terhadap stabilitas ekonomi reformasi.¹¹

Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, kondisi ekonomi Indonesia sempat menunjukkan tanda-tanda perbaikan dengan situasi keuangan yang mulai stabil. Namun, keadaan kembali memburuk pada April 2001, ketika nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika melemah hingga mencapai Rp12.000. Pelemahan ini memberikan dampak negatif pada perekonomian nasional dan memperlambat proses pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung.

Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, stabilitas nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika berhasil dicapai, yang turut menjaga kestabilan harga barang. Tingkat inflasi yang rendah dan cadangan devisa negara yang stabil menjadi pencapaian positif pada periode ini. Namun, pertumbuhan ekonomi tetap tergolong rendah karena kurangnya daya tarik investasi di Indonesia serta tingginya suku bunga deposito.

Untuk meningkatkan perkembangan ekonomi, beberapa langkah strategis dilakukan, seperti mengajukan penundaan pembayaran utang sebesar US\$ 5,8 miliar, mengalokasikan dana sebesar Rp 116,3 triliun untuk pembayaran utang luar negeri, serta menerapkan kebijakan privatisasi terhadap sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Perekonomian Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan selama masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Rata-rata pertumbuhan ekonomi mencapai sekitar 5 hingga 6 persen per tahun, dan ekonomi Indonesia mampu bertahan dari dampak krisis ekonomi dan finansial yang melanda Eropa pada 2008 hingga 2009. Dalam mengelola perekonomian negara, pemerintah menerapkan berbagai kebijakan, di antaranya mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan melakukan pengurangan utang luar negeri.¹²

Beralih ke perekonomian di era Presiden Joko Widodo. Sejak memulai masa kepemimpinan, Presiden Jokowi menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama. Pemerintah mengalokasikan anggaran besar untuk membangun berbagai infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, dan jaringan kereta api, yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah.

Selama masa ini, proyek-proyek besar seperti Tol Trans-Jawa, Trans-Sumatera, dan pembangunan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung menjadi simbol keberhasilan dalam mengatasi masalah konektivitas yang sebelumnya menghambat distribusi barang dan jasa. Selain itu, proyek infrastruktur ini juga menciptakan lapangan pekerjaan baru dan menarik investasi di daerah-daerah yang sebelumnya kurang berkembang.

Keberadaan infrastruktur baru seperti jalan tol dan pelabuhan membuat kawasan-kawasan terpencil lebih terhubung, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, dan menurunkan biaya logistik secara signifikan. Dalam jangka panjang, ini diharapkan dapat memperkuat daya saing ekonomi Indonesia di pasar global.

Investasi besar-besaran pada infrastruktur ini tidak hanya memperbaiki konektivitas, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru, terutama di daerah yang sebelumnya sulit dijangkau. Selama masa pemerintahan Jokowi, pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif stabil di angka sekitar 5 persen, meskipun sempat terpuruk akibat pandemi COVID-19 pada 2020.

Pada saat itu, Indonesia mencatatkan kontraksi ekonomi sebesar -2,1 persen, namun mampu pulih dengan cepat dalam tahun-tahun berikutnya berkat kebijakan fiskal dan moneter yang adaptif, termasuk stimulus ekonomi dan dukungan untuk sektor UMKM. Salah satu

¹¹ Finaka, A. W., Persada, R. K. B., & Paolo, B. (n.d.). Masa Pemerintahan BJ Habibie: Reformasi Ekonomi Atasi Krisis. Indonesia Baik. Dikutip Desember 16, 2024, dari <https://indonesiabaik.id/infografis/reformasi-ekonomi-atasi-krisis>

¹² Putri, V. K. M. (2022, November 3). Perkembangan Ekonomi Indonesia pada Masa Reformasi. Kompas.Com.

<https://www.kompas.com/skola/read/2022/11/03/13000269/perkembangan-ekonomi-indonesia-pada-masa-reformasi>

kebijakan penting yang diambil adalah penurunan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia, diiringi dengan insentif untuk sektor-sektor tertentu seperti pariwisata, manufaktur, dan digital.

Jokowi juga mendorong transformasi ekonomi digital untuk memanfaatkan potensi besar sektor ini yang diprediksi akan mencapai 146 miliar dolar AS pada 2025. Di era kepemimpinannya, sektor digital berkembang pesat dan menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga mendukung pengembangan ekosistem startup melalui regulasi yang ramah terhadap perusahaan teknologi dan infrastruktur digital.

Ekonomi digital Indonesia berkembang pesat, dengan munculnya unicorn dan decacorn seperti Gojek, Tokopedia, Bukalapak, dan Traveloka. Pertumbuhan sektor ini tidak hanya terbatas pada kota-kota besar, tetapi juga merambah daerah yang sebelumnya belum terjangkau teknologi.

Pemerintah juga mendorong literasi digital dan e-commerce di kalangan UMKM melalui program pelatihan dan dukungan infrastruktur teknologi. Salah satu kebijakan yang paling ambisius adalah pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law, yang bertujuan untuk menyederhanakan regulasi, memangkas birokrasi, dan mempermudah proses investasi. Meskipun menuai kontroversi, kebijakan ini berhasil meningkatkan daya tarik Indonesia di mata investor asing.

Selain itu, kebijakan hilirisasi sumber daya alam menjadi langkah signifikan. Jokowi menekankan pentingnya pengolahan bahan mentah di dalam negeri sebelum diekspor, memberikan nilai tambah bagi ekonomi nasional. Sebagai contoh, ekspor nikel mentah dihentikan pada 2020 untuk mendorong pembangunan industri pengolahan dalam negeri.

Kebijakan ini berhasil menarik investasi besar dari sektor baterai listrik, yang berperan penting dalam ekosistem kendaraan listrik, dan Indonesia berupaya memperkuat posisinya dalam rantai pasok global industri baterai dan kendaraan listrik, mengingat potensi cadangan mineral yang dimilikinya.

Meski berhasil mencatatkan berbagai pencapaian seperti pembangunan infrastruktur, penguatan sektor digital, dan peningkatan investasi, masih ada sejumlah tantangan struktural yang perlu diatasi untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pencapaian terbesar dari pemerintahan Jokowi adalah pembangunan infrastruktur yang masif. Jalan tol, pelabuhan, bandara, dan jaringan kereta api telah memperbaiki konektivitas dan menurunkan biaya logistik. Namun, tantangan utama pasca-Jokowi adalah memastikan keberlanjutan proyek infrastruktur yang sebagian besar dibiayai dengan utang. Pemerintah berikutnya harus memastikan agar proyek-proyek ini dapat memberikan dampak ekonomi yang diharapkan.

Selain itu, utang negara yang meningkat signifikan selama masa pemerintahan Jokowi, terutama untuk mendanai proyek infrastruktur dan stimulus ekonomi selama pandemi, bisa menjadi masalah di masa depan. Pemerintah berikutnya harus mengelola utang dengan lebih bijak, meningkatkan pendapatan negara, dan memperbaiki pengelolaan anggaran.

Ekonomi Indonesia masih bergantung pada ekspor komoditas seperti batu bara, kelapa sawit, dan nikel. Meskipun ada upaya hilirisasi, tantangan selanjutnya adalah memastikan keberlanjutan proses ini, yang membutuhkan investasi jangka panjang dan kebijakan yang konsisten. Kebijakan hilirisasi harus tetap menjadi prioritas dengan dukungan infrastruktur dan tenaga kerja yang terampil.

Sektor digital, yang tumbuh pesat selama era Jokowi, juga menghadapi tantangan terkait regulasi dan kesiapan infrastruktur. Pasca-Jokowi, penting untuk memastikan bahwa regulasi tetap mendukung inovasi di sektor ini, serta mengatasi masalah akses internet yang belum merata. Penyebab rendahnya produktivitas tenaga kerja di Indonesia, terutama terkait keterampilan dan kualitas pendidikan yang belum optimal, juga menjadi tantangan utama.

Ke depan, Indonesia perlu fokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan industri. Diversifikasi ekonomi menjadi kebutuhan mendesak untuk mengurangi ketergantungan pada komoditas. Sektor pariwisata, yang sempat berkembang pesat sebelum pandemi, harus dihidupkan kembali dengan fokus pada destinasi baru dan infrastruktur pendukung. Selain itu, sektor ekonomi kreatif, energi terbarukan, dan teknologi hijau bisa menjadi pilar baru ekonomi Indonesia di masa depan.

Pemerintah pasca-Jokowi juga harus menangani ketimpangan ekonomi antarwilayah, dengan memperkuat program pembangunan daerah dan mendorong sektor pertanian modern serta pariwisata berbasis komunitas. Isu lingkungan juga semakin penting, terutama terkait deforestasi dan kerusakan ekosistem yang disebabkan oleh ekspansi industri. Kebijakan ekonomi hijau dan pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab harus menjadi prioritas, agar pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan keberlanjutan lingkungan.

Secara keseluruhan, meskipun Indonesia telah mencapai berbagai pencapaian ekonomi penting selama 10 tahun masa kepemimpinan Jokowi, perjalanan menuju visi Indonesia Emas 2045 masih penuh tantangan. Namun, dengan komitmen dan kerja sama yang kuat, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama di dunia.¹³

Dewasa ini, meskipun rata-rata pertumbuhan ekonomi lebih rendah dibanding era orde baru, yaitu 5-6% per tahun, fokusnya pada pemerataan pembangunan dan pengurangan dampak krisis memberikan stabilitas yang lebih berkelanjutan dalam jangka panjang. Presiden baru Prabowo Subianto menargetkan ekonomi Indonesia harus tumbuh di angka 8 persen. Di mana ini bukan hal yang mudah untuk menggapainya.

Namun, dengan strategi yang terencana, bukan hal yang tidak mungkin untuk menggapainya. Strategi yang perlu dipertimbangkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen pada era Prabowo adalah pemanfaatan teknologi digital secara maksimal. Digitalisasi berpotensi menjadi pengubah permainan dalam ekonomi, dengan memaksimalkan penggunaan teknologi, mendukung perkembangan UMKM, dan meningkatkan efisiensi birokrasi. Indonesia juga perlu fokus pada sektor-sektor unggulan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Eko Listiyanto, menyarankan agar inovasi digital didorong dengan memberikan insentif kepada birokrasi yang berhasil beralih ke digitalisasi. Hal ini, menurutnya, dapat meningkatkan efisiensi anggaran dan memperbaiki koordinasi antar lembaga.

Optimalisasi digitalisasi juga penting untuk mengurangi kebocoran anggaran dan praktik korupsi. Eko berharap bahwa dengan digitalisasi sektor keuangan dan transparansi sistem, kebocoran dapat diminimalkan dan mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi yang tinggi.¹⁴

Era kepemimpinan Prabowo Subianto sebagai Presiden dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden membuka babak baru dalam perkembangan ekonomi Indonesia. Pemerintahan ini memiliki potensi untuk menciptakan perubahan besar dalam pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, meskipun menghadapi berbagai tantangan, baik dari faktor global maupun domestik.

Salah satu tantangan terbesar adalah defisit fiskal yang signifikan. Pada 2025, pemerintah menargetkan pendapatan negara mencapai Rp3.005,1 triliun, sementara belanja diperkirakan mencapai Rp3.621,3 triliun, yang menyebabkan defisit sekitar Rp616,2 triliun atau 2,53% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Selain itu, jatuh tempo utang yang mencapai Rp800 triliun juga menambah beban fiskal yang perlu dikelola dengan kebijakan yang lebih efisien.

Masalah pengangguran juga menjadi tantangan besar dengan tingkat pengangguran Indonesia yang masih tinggi, yaitu 5,2%, yang lebih tinggi dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Ditambah dengan kemiskinan yang mencapai 9,03% atau sekitar 25,22 juta orang, masalah ketimpangan pendapatan semakin memperburuk kondisi tersebut, terutama di wilayah pedesaan.

Selain tantangan, pemerintahan Prabowo-Gibran juga dihadapkan pada krisis energi dan ketergantungan pada ekspor komoditas, dengan salah satu risiko terbesar datang dari kebijakan biodiesel B50 yang dapat mengurangi ekspor minyak sawit mentah (CPO) hingga 6 juta ton, yang

¹³ Rianto, M. N. (n.d.). *Refleksi 10 Tahun Perkembangan Ekonomi Era Jokowi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Website Resmi. Dikutip December 16, 2024, dari <https://uinjkt.ac.id/id/refleksi-10-tahun-perkembangan-ekonomi-era-jokowi#:~:text=Selama%20masa%20pemerintahan%20Jokowi%2C%20pertumbuhan,cepat%20pada%20tahun%2Dtahun%20berikutnya>.

¹⁴ RRI. (2024, Oktober 24). Target, Pertumbuhan Ekonomi era Prabowo Jadi 8%. RRI. <https://rri.co.id/bisnis/1066667/target-pertumbuhan-ekonomi-era-prabowo-jadi-8>

berpotensi mempengaruhi neraca perdagangan Indonesia. Namun, pemerintahan ini juga memiliki peluang besar, di antaranya melalui percepatan digitalisasi ekonomi yang dapat meningkatkan inklusi keuangan dan produktivitas UMKM.

Dengan potensi Indonesia sebagai hub ekonomi digital di Asia Tenggara, khususnya dengan populasi muda yang melek teknologi dan penetrasi internet yang tinggi, digitalisasi menjadi salah satu kunci sukses. Selain itu, investasi infrastruktur yang mencakup pembangunan jalan tol, pelabuhan, dan fasilitas energi terbarukan diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang merata.

Pengelolaan potensi sumber daya alam, seperti sektor pertambangan dan energi terbarukan, juga menjadi peluang besar untuk memperkuat daya saing Indonesia di pasar global. Di sisi lain, tingginya permintaan nikel seiring dengan perkembangan kendaraan listrik membuka peluang besar bagi Indonesia, sebagai salah satu produsen nikel terbesar di dunia, untuk memanfaatkan potensi ini guna mendongkrak perekonomian negara.¹⁵

Beralih ke bidang sosial, perbedaan kebijakan sosial antara era Orde Baru dan era Reformasi memengaruhi pembangunan dan stabilitas Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pada masa Orde Baru, kebijakan sosial yang diterapkan sangat terpusat, dengan fokus pada pembangunan infrastruktur dan urbanisasi, namun sering kali mengabaikan pemerataan di daerah-daerah luar Jawa.¹⁶

Pemerintah Orde Baru menekankan pada stabilitas sosial dengan cara meminimalkan konflik sosial dan memberikan bantuan sosial terbatas, tetapi cenderung mengutamakan efisiensi ekonomi yang sering kali meminggirkan kelompok-kelompok miskin dan terpinggirkan. Setelah Reformasi, kebijakan sosial bertransformasi menjadi lebih desentralisasi dengan pemberian kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola kebijakan sosial. Program-program bantuan sosial mulai dirancang lebih inklusif, mencakup jaminan sosial dan akses kesehatan yang lebih merata, serta menekankan pada pemberdayaan masyarakat.

Layanan Kesehatan dan Akses Pendidikan

Salah satu fasilitas pemerintah yang dapat dirasa perbedaannya secara signifikan adalah layanan kesehatan. Pada era Orde Baru, sistem jaminan sosial untuk kesehatan belum berkembang seperti saat ini. Tidak ada program yang setara dengan BPJS Kesehatan yang mencakup seluruh lapisan masyarakat. Sistem kesehatan yang difasilitasi pemerintah, terbatas pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) saja yang biasa disebut askes. Askes muncul bersamaan taspem (tabungan pensiun) sejak 1968.

Pada tahun 1992, pegawai swasta mulai mendapatkan jaminan sosial melalui UU Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan (Jamsostek). Namun, jaminan kesehatan yang disediakan oleh UU Jamsostek ini bersifat terbatas dan tidak diwajibkan, sehingga pada 2013 hanya sekitar 5% pegawai swasta yang memiliki jaminan kesehatan, jauh dari harapan pemerintah. Hingga saat ini, belum ada jaminan pensiun dengan manfaat pasti bagi pegawai swasta, kecuali di beberapa perusahaan BUMN dan perusahaan besar.

Jaminan sosial di Indonesia mulai mendapat perhatian lebih saat Megawati Soekarnoputri menjabat sebagai Presiden pada 2004. Ia membentuk Tim Sistem Jaminan Sosial Nasional untuk merumuskan RUU SJSN, yang kemudian disahkan menjadi UU No. 40/2004 tentang SJSN. Namun, program ini tidak dilanjutkan dengan baik selama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Jaminan kesehatan nasional yang diatur dalam UU SJSN kemudian dinamai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang memastikan seluruh penduduk di seluruh daerah mendapatkan hak jaminan kesehatan yang setara.

Perbedaan mendasar antara jaminan kesehatan era Orde Baru dan setelah Reformasi adalah bahwa pada masa Orde Baru, sistem kesehatan lebih mengarah ke sektor swasta dengan biaya yang memberatkan masyarakat, terutama saat menghadapi penyakit berat. Sebaliknya, JKN bertujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan kepada seluruh rakyat tanpa harus

¹⁵ Prasetyo, S. (2024, November 9). *Tantangan & Peluang Ekonomi di Era Kepemimpinan Prabowo Gibran*. PINA. <https://pina.id/artikel/detail/tantangan-dan-peluang-ekonomi-di-era-kepemimpinan-prabowo-gibran-l36p4wtv6>

¹⁶ Obet, R. (2024, Januari 26). *Tantangan Jawa-sentrisme: Menuju Keseimbangan Pembangunan*. Fakultas Ilmu Budaya. <https://fib.unair.ac.id/fib/2024/01/26/tantangan-jawa-sentrisme-menuju-keseimbangan-pembangunan/>

membayar mahal. JKN mulai diterapkan pada Januari 2009 meski terlambat dan banyak nyawa terenggut akibat kurangnya jaminan kesehatan sebelumnya.

Namun, meski JKN hadir dengan niat baik, pelaksanaannya masih menghadapi banyak tantangan, seperti rendahnya iuran yang menyebabkan fasilitas dan pembayaran tenaga kesehatan tidak memadai. Selain itu, kebijakan pemerintah daerah yang kurang fleksibel membuat sejumlah daerah belum mengalirkan dana JKN. Hal ini menyebabkan banyak keluhan terkait pelayanan kesehatan. Program ini, meskipun telah banyak dipuji, masih dipandang oleh banyak pihak sebagai layanan yang kurang memadai.

Dalam upaya memperbaiki sistem ini, Presiden Joko Widodo meluncurkan Kartu Indonesia Sehat (KIS), namun program ini mendapat kritik karena diterbitkan tanpa melalui mekanisme JKN yang sudah ada. Meskipun ada banyak perubahan dalam sistem jaminan kesehatan di Indonesia, harapan tetap ada agar pemerintah terus konsisten menyediakan layanan kesehatan yang terjangkau dan merata yang terus ditingkatkan demi kesejahteraan masyarakat.¹⁷

Setelah era Reformasi, pemerintah Indonesia memperkenalkan BPJS Kesehatan, yang bertujuan memberikan jaminan kesehatan untuk seluruh warga negara, baik yang bekerja di sektor formal maupun informal. BPJS Kesehatan ini menyediakan layanan medis di berbagai fasilitas kesehatan dengan biaya yang terjangkau bagi masyarakat. Fasilitas yang ditawarkan termasuk rawat inap, rawat jalan, dan tindakan medis lainnya yang terbagi dalam beberapa kelas (Kelas 1, 2, dan 3), yang memberikan opsi layanan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial peserta.

Pada BPJS Kesehatan saat ini, ada juga pembaruan, seperti penggantian sistem kelas dengan sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang memberikan perawatan lebih merata di seluruh kelas rumah sakit.¹⁸ Pada tahun 2025 mendatang, Kementerian Kesehatan RI akan meluncurkan program *medical check up* gratis yang dapat digunakan setahun sekali setiap hari ulang tahun. Tentunya ini adalah suatu terobosan besar dan sangat berguna untuk mengontrol kesehatan warga Indonesia agar kedepannya dapat hidup lebih sehat dan menyongsong generasi yang sehat dan tangguh.¹⁹

Selain itu di sektor pendidikan. Pada era orde baru, sekolah dikenakan pungutan biaya. Sebetulnya pemerintah memiliki program beasiswa pendidikan, yaitu Yayasan Supersemar.

Yayasan Supersemar didirikan pada 16 Mei 1974 dengan tujuan memberikan dukungan pembiayaan pendidikan untuk anak-anak Indonesia, mulai dari tingkat SD hingga perguruan tinggi. Yayasan ini menggunakan gambar Semar sebagai simbol dalam surat-suratnya. Semar, yang dikenal dalam pewayangan sebagai punakawan, merupakan perwujudan dari Batara Ismaya, yang berperan dalam membimbing para ksatria yang berbudi luhur.

Lebih dari 2,7 juta remaja dan pemuda Indonesia telah merasakan manfaat dari yayasan ini, dan di antara mereka, banyak yang kini menjabat sebagai pemimpin di negara ini, mulai dari walikota hingga menteri.²⁰ Namun beasiswa Supersemar ini hanya terbatas tidak mengcover seluruh biaya sekolah dan universitas. Pada masa reformasi, tepatnya pada 2005, Presiden SBY berkeinginan agar pendidikan di Indonesia dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang mampu. Upaya besar pun dilakukan, dengan menetapkan anggaran pendidikan sebesar 20% dari total APBN. Salah satu hasil konkret dari kebijakan ini adalah pengalokasian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

¹⁷ Thabrany, H. (2014, Oktober 31). Transformasi Wajah Jaminan Kesehatan. *Cnn Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20141031163324-21-9143/transformasi-wajah-jaminan-kesehatan>

¹⁸ Regar, R. F., & Andryanto, S. D. (2024, May 17). Perbedaan Sistem Kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan yang Bakal Diganti dengan KRIS. *Tempo*. <https://www.tempo.co/politik/perbedaan-sistem-kelas-1-2-dan-3-bpjs-kesehatan-yang-bakal-diganti-dengan-kris-58253>

¹⁹ CNN Indonesia. (2024, November 5). Warga RI Bisa Medical Check Up Gratis 2025 Nanti, Ini Caranya. *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20241105152034-255-1163217/warga-ri-bisa-medical-check-up-gratis-2025-nanti-ini-caranya>

²⁰ Joesoef, H. M. (2018, November 26). Yayasan Supersemar. *Indonesiainside.Id*. <https://indonesiainside.id/narasi/2018/11/26/yayasan-supersemar>

Pendidikan diakui sebagai alat perjuangan yang sangat efektif. Melalui pendidikan, cita-cita kemerdekaan Indonesia dapat terwujud, dan banyak tokoh bangsa yang berjuang melawan penindasan dan kebodohan berkat pendidikan.

Dengan anggaran pendidikan yang melimpah, pemerintahan SBY dapat merumuskan program yang tepat guna, yaitu BOS. Program ini diluncurkan pada 2005 untuk mendukung pendidikan dasar dan menengah, dengan target penerima dana BOS meliputi SD/MI, SMP/MTs, pesantren, serta satuan pendidikan non-Islam. Pemerintah berusaha membuka akses pendidikan yang seluas-luasnya bagi masyarakat miskin, dengan tujuan mewujudkan sekolah gratis.

Dana BOS meringankan beban orang tua, karena tidak ada lagi pungutan atau sumbangan yang membebani mereka. Dana tersebut mencakup pembiayaan untuk pembelajaran, pengembangan kurikulum, dan operasional sekolah. Program BOS dimulai pada 2004-2009, hanya untuk SD dan SMP, lalu diperluas ke SMA pada 2012-2013 dan terus berjalan hingga kini. Pemerintah juga mengadakan berbagai program untuk pendidikan tinggi, seperti beasiswa bagi keluarga miskin dan program Bidik Misi, yang memberikan kuliah gratis beserta dana pendidikan sebesar Rp600 ribu per bulan selama masa studi.

Antara 2005 hingga 2013, pemerintahan SBY mengalokasikan Rp243,28 triliun untuk pendidikan. Kebijakan sekolah gratis pertama kali diterapkan untuk SD dan SMP pada 2005, kemudian diperluas ke SMA pada tahun ajaran 2012/2013. Walaupun ada kemajuan, tantangan terbesar yang dihadapi adalah ketidakmerataan implementasi di daerah-daerah, yang sering terkendala masalah kapasitas dan distribusi anggaran yang terbatas.

Sejak 2014 hingga kini, telah terimplementasi program sekolah gratis yang menyeluruh. Hal ini didukung melalui Program Indonesia Pintar yang digagas Presiden Jokowi dan prakteknya dengan Kartu Indonesia Pintar. Program Bidikmisi juga kini berganti nama menjadi Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah sejak tahun 2020.²¹

Sistem Partai

Pada era Orde Baru, sistem kepartaian Indonesia mengalami pembatasan yang ketat dengan dominasi partai-partai yang mendukung pemerintahan Presiden Soeharto. Dalam upaya untuk menciptakan stabilitas politik, Soeharto melakukan penyederhanaan jumlah partai melalui berbagai kebijakan, sehingga hanya ada tiga partai besar yang diizinkan berkompetisi dalam Pemilu, yaitu Golkar, PPP, dan PDI. Partai-partai ini sering kali tidak memiliki kebebasan politik yang sesungguhnya, karena sangat dipengaruhi oleh kekuasaan eksekutif dan tidak bebas dalam menyuarakan kritik terhadap pemerintah. Hal ini menjadikan partai politik lebih sebagai alat legitimasi pemerintahan daripada sebagai penghubung antara rakyat dan negara.²²

Sebaliknya, pada masa Reformasi, yang dimulai sejak 1998, sistem kepartaian Indonesia berubah drastis menjadi lebih terbuka. Pasca tumbangannya rezim Orde Baru, masyarakat bebas mendirikan partai politik, yang mendorong terjadinya pluralitas politik yang lebih kaya. Keberagaman ini tercermin dalam banyaknya partai politik yang muncul, serta kebebasan yang lebih besar dalam berkompetisi pada Pemilu. Selain itu, pemilu yang lebih demokratis memberikan ruang bagi masyarakat untuk memilih secara lebih bebas, dengan partai-partai yang lebih beragam dan mampu menyuarakan berbagai kepentingan politik yang berbeda.

Meskipun sistem kepartaian pada era Reformasi Indonesia memberi ruang yang lebih luas bagi pluralisme politik dan kebebasan berpolitik, namun terdapat beberapa kekurangan yang signifikan. Salah satu masalah utama adalah fragmentasi politik yang tinggi, di mana banyaknya partai politik yang muncul seringkali menyebabkan kebingungannya arah politik dan sulitnya mencapai konsensus. Banyak partai politik yang hanya berfokus pada kepentingan jangka pendek, tanpa memperhatikan agenda kebijakan yang jelas dan berkelanjutan. Hal ini dapat memperburuk kualitas demokrasi karena pemilih sering kali tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai platform partai yang mereka pilih.

Selain itu, sebagian besar partai politik di era Reformasi masih mengutamakan kepentingan individu atau kelompok elit daripada memperjuangkan aspirasi rakyat secara

²¹ Pos Indonesia. (n.d.). *Resmi Ganti Nama, ULBI Beri Beasiswa Kuliah Gratis Sampai Lulus*. Pos Indonesia. <https://www.posindonesia.co.id/id/articles/detail/resmi-ganti-nama-ulbi-beri-beasiswa-kuliah-gratis-sampai-lulus>

²² Prabowo, G., & Gischa, S. (2020, November 1). *Sistem Kepartaian masa Orde Baru*. Kompas.Com. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/11/01/142648769/sistem-kepartaian-masa-orde-baru>

keseluruhan. Ini terlihat dari kurangnya partai yang benar-benar berorientasi pada program-program pembangunan yang komprehensif dan inklusif. Tidak jarang pula partai politik di Indonesia lebih memperjuangkan kekuasaan untuk akses ke sumber daya ekonomi, yang mengarah pada praktik patronase dan politik uang yang merusak integritas proses demokrasi. Kurangnya partisipasi politik yang nyata dari anggota partai dalam pembuatan kebijakan, serta tingginya ketergantungan pada figur tertentu juga menjadi hambatan besar bagi perkembangan partai yang lebih substantif dan berkelanjutan.²³

Sistem multipartai di Indonesia juga mendorong masalah lain, termasuk pemborosan anggaran dan praktik suap atau *money politics*. Salah satu dampak dari banyaknya jumlah partai politik adalah terjadinya fragmentasi politik yang menyebabkan koalisi yang rapuh di pemerintahan. Hal ini sering kali memicu kebutuhan untuk memberikan kompensasi politik, seperti bantuan anggaran kepada partai-partai kecil yang bergabung dalam koalisi. Ini bisa menyebabkan pemborosan anggaran yang tidak efektif karena dana sering kali dialokasikan untuk kepentingan politik, bukan untuk pembangunan yang substansial.^{24 25}

Selain itu, persaingan politik yang intens di antara banyak partai juga sering kali menumbuhkan praktik suap dan *money politics*, terutama dalam Pemilu dan dalam pengambilan keputusan di parlemen. Partai politik cenderung mencari dukungan dengan memberikan imbalan tertentu, yang bisa berupa dana atau akses ke proyek-proyek pemerintah, untuk memperkuat posisi mereka dalam pemerintahan. Hal ini tentu saja memperburuk integritas politik dan merugikan masyarakat.²⁶

Kebebasan Pers

Inge Hutagalung dalam artikelnya yang berjudul *Dinamika Sistem Pers di Indonesia* yang diterbitkan di *Jurnal Interaksi* Vol. 2 No. 2 (2013) menjelaskan bahwa pada masa Orde Baru, pers dianggap sebagai media pendukung keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu, isi pers Indonesia harus mencerminkan pembangunan tersebut. Dari kenyataan ini terlihat jelas bahwa pers pada masa itu tidak memiliki kebebasan, karena harus mendukung program pemerintah Orde Baru.²⁷

Di awal masa Orde Baru, Soeharto menjanjikan adanya kebebasan pers melalui Undang-Undang Pokok Pers No. 11 Tahun 1966. Namun, kenyataannya banyak peristiwa yang menunjukkan bahwa kebebasan pers pada masa itu justru sangat dibatasi dan bahkan dirampas. Menurut Satrio Saptohadi dalam jurnal *Pasang Surut Kebebasan Pers di Indonesia*, Undang-Undang No. 11 Tahun 1966 tampaknya memberikan kebebasan pers. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, banyak pasal yang bertentangan dengan kebebasan pers yang dijanjikan. Misalnya, Pasal 5 yang menyatakan "Pers nasional tidak dikenakan sensor atau pembredelan," namun Pasal 20 ayat 1 mengharuskan adanya "Surat Izin Terbit" untuk menerbitkan pers.²⁸

Undang-Undang ini kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 1982 tentang Surat Izin Usaha Percetakan dan Penerbitan (SIUPP), namun tidak ada perubahan substansial. Kebebasan pers tetap dikontrol pemerintah melalui izin terbit yang semakin diperketat. Bahkan, sistem izin terbit ini menjadi salah satu sumber korupsi karena sulitnya memperoleh izin meskipun banyak permintaan.

²³ Fiani, P. (2013). Perbandingan sistem kepartaian di masa orde baru dan pasca reformasi. *Fak. Hukum Universitas Sriwijaya*. <https://onsearch.id/Record/IOS4546.slims-4089/Details>

²⁴ Zafrullah, S. (2008). Dampak sistem multipartai dalam kehidupan politik Indonesia. *Perpustakaan Komisi Pemberantasan Korupsi*.

²⁵ Atillah, R., & Gischa, S. (2023, Oktober 14). Sistem Multipartai dan Dampaknya. *Kompas.Com*. <https://www.kompas.com/skola/read/2023/10/14/073000469/sistem-multipartai-dan-dampaknya->

²⁶ Fauzi, D. R. (2019, Maret 26). *Ironi Partai Politik dalam Pusaran Korupsi – BERITA UPI*. Portal Berita Universitas Pendidikan Indonesia. <https://berita.upi.edu/ironi-partai-politik-dalam-pusaran-korupsi/>

²⁷ Hutagalung, I. (2013). *Dinamika Sistem Pers di Indonesia*. *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(2), 156–163. <https://doi.org/10.14710/interaksi.2.2> 156-163

²⁸ Saptohadi, S. (2011). PASANG SURUT KEBEBASAN PERS DI INDONESIA. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(1), 127–138. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.1.85>

Salah satu contoh ketidakbebasan pers era orde baru terjadi pada Majalah Sabili. Karena adanya tekanan terhadap media Islam di era orde baru, dan notabene Majalah Sabili adalah media yang berisi dakwah Islam, maka pihak pengurus tidak mengurus perihal SIUPP dan STT media tersebut. Hal ini merupakan bentuk perlawanan terhadap rezim orde baru yang otoriter. Dalam rangka mengamankan diri dari pemberedelan, Majalah Sabili seringkali berpindah-pindah kantor. Tercatat Majalah Sabili telah berpindah 4 kali masa 1988-1992. Upaya lain dalam melawan orde baru juga dapat dibandingkan dengan Majalah Sabili di era reformasi. Di era orde baru, karena majalah ini ilegal, maka distribusinya sembunyi-sembunyi dan hanya ditujukan kepada kelompok aktivis dakwah. Sementara di era reformasi, distribusinya sudah ke agen atau lapak dan terbuka untuk umum. Di era orde baru, redaktur juga harus menggunakan nama samaran untuk mengelabui, sementara di era reformasi, sudah terbuka identitasnya.²⁹

Pada tahun 1998, gerakan Reformasi muncul, yang menggulingkan rezim Orde Baru dan menghasilkan peraturan perundang-undangan yang baru sebagai pengganti undang-undang yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjadi pondasi terhadap kebebasan pers yang kita rasakan saat ini. Berdasarkan teori media normatif, pers di era Reformasi menggambarkan sistem liberal pluralis atau model yang ditandai dengan beragamnya isu yang diliput oleh pers. Banyak penerbitan baru bermunculan, seperti tabloid, majalah, dan surat kabar. Sayangnya, peningkatan jumlah media tidak diikuti dengan perbaikan kualitas jurnalistik, sehingga banyak media yang menuliskan informasi yang tidak berdasarkan data dan fakta.

Dalam artikel Yin yang berjudul *Beyond The Four Theories of The Press: A New Model for the Asian & the World Press* (2008), sistem pers di Indonesia pada era Reformasi digambarkan sebagai pers yang bebas namun tidak bertanggung jawab.³⁰ Artinya, meskipun pers menjadi lebih bebas, ia gagal menjalankan prinsip-prinsip dasar jurnalistik dan tidak memberikan peran positif dalam masyarakat. Banyak media yang melanggar prinsip dasar jurnalistik, yakni menyampaikan kebenaran. Sistem pers didorong oleh kekuatan pasar, isinya seringkali sensasional, kurang menghargai etika, dan mengandung banyak kekerasan serta pornografi. Pers sering digunakan untuk kepentingan politik pribadi atau kelompok tertentu, yang merupakan dampak dari pemusatan kepemilikan media pada segelintir orang.³¹

Kebebasan Beragama

Pada era Orde Baru, kebebasan beragama di Indonesia terbatas oleh kontrol negara yang ketat. Meskipun Indonesia mengakui pluralitas agama, pemerintah Orde Baru mengutamakan agama yang dianggap lebih sesuai dengan ideologi negara, dan cenderung mengabaikan atau membatasi ekspresi keagamaan yang berbeda. Kebijakan ini tercermin dalam regulasi yang membatasi aktivitas kelompok agama minoritas dan memberi ruang terbatas bagi praktik keagamaan non-dominan.

Tercatat banyak sekali pengekanan terhadap ekspresi beragama di era orde baru, termasuk peristiwa Tanjung Priok tahun 1984.³² Hal ini dilatarbelakangi protes terhadap pelarangan jilbab yang dilakukan pemerintah orde baru pada tahun 1982. Melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No. 052/C/Kep/D/1982 tentang Pedoman Pakaian Seragam Sekolah di Siswa Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Tingkat Atas dalam Lingkungan Pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah,

²⁹ Mursal, I. F., & Wita, G. *Op. Cit*

³⁰ Yin, J. (2008). *Beyond the Four Theories of the Press: A New Model for the Asian & the World Press*. *Journalism & Mass Communication Monographs*.

³¹ Trianita, K. (2022, Juni 13). *Perjalanan Media Massa dari Orde Baru hingga Reformasi*. *Kumparan*.
<https://kumparan.com/khoirul-trianita/perjalanan-media-massa-dari-orde-baru-hingga-reformasi-1yEpwHBMYou/full>

³² KontraS: Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. (2024, September 12). *40 Tahun Nestapa Pengabaian Negara terhadap Korban Peristiwa Tanjung Priok 1984*. KontraS.Org. <https://kontras.org/media/siaranpers/40-tahun-nestapa-pengabaian-negara-terhadap-korban-peristiwa-tanjung-priok-1984>

pemerintah melarang penggunaan jilbab dengan dalih melawan radikalisme. Banyak siswi sekolah dikeluarkan dari sekolah negeri. Saat itu, siswi muslimah hanya dihadapkan dua pilihan, tetap bersekolah di sekolah negeri namun melepas jilbabnya, atau pindah ke sekolah swasta.³³

Setelah reformasi 1998, kebebasan beragama di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Pasca-Orde Baru, masyarakat mulai merasakan kebebasan lebih besar dalam memilih dan menjalankan agama mereka. Terutama di era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) kebebasan beragama dan keberagaman semakin dijunjung. Masyarakat Tionghoa pun bergembira karena pada era Gus Dur, Konghucu resmi menjadi agama yang diakui.³⁴ Namun, meskipun secara formal lebih bebas, tantangan terhadap kebebasan beragama tetap ada. Ketidaktegasan pemerintah dalam menanggapi intoleransi dan pemanfaatan agama untuk kepentingan politik tertentu menyebabkan munculnya kelompok intoleran dan ketegangan antar agama. Hal ini mencerminkan adanya perbedaan dalam implementasi kebebasan beragama, meskipun kerangka hukum sudah lebih mendukung pluralisme dan kebebasan beragama pasca-reformasi. Hal ini sebetulnya merupakan paradoks dari kebebasan beragama dan kebebasan berekspresi itu sendiri.

Karena kebebasan jauh didukung di era reformasi, maka banyak orang tak bertanggungjawab menjadi "instansi yang menghakimi sendiri". Persekusi terhadap kalangan Ahmadiyah,³⁵ persekusi terhadap pembangunan gereja³⁶ merupakan contoh upaya main hakim sendiri yang dilakukan masyarakat karena paradoks kebebasan itu sendiri. Mereka berdalih dengan alasan birokrasi sehingga melakukan persekusi, namun bila kita melihat secara jernih, seharusnya upaya yang dilakukan adalah membantu perizinannya, bukan melakukan penekanan.

Kerusuhan Antar Etnis

Pasca reformasi, banyak sekali kerusuhan yang melibatkan etnis yang berbeda. Dua di antaranya adalah Konflik Ambon tahun 2001,³⁷ dan Konflik Dayak-Madura di Sampit, Kalimantan Tengah tahun 2001.³⁸ Hal ini dipicu karena masyarakat merasakan kebebasan yang lebih luas, tetapi regulasi dan pengawasan pemerintah terhadap isu-isu lokal melemah. Ini menyebabkan konflik-konflik yang selama ini terpendam muncul ke permukaan, termasuk konflik berbasis suku, agama, dan budaya.

Sementara hal ini tidak mungkin terjadi di era orde baru. Kalaupun hal ini terjadi, sudah pasti aparat akan menekannya supaya tidak menjadi konflik yang lebih besar. Tentunya, penekanan terjadi tanpa mempertimbangkan aspek Hak Asasi Manusia (HAM).

Kebebasan Berpendapat

Selama masa Orde Baru, pemerintah menerapkan sistem tertutup yang sangat membatasi kritik terhadap otoritas. Pemerintahan beroperasi di bawah kerangka Dwifungsi ABRI, dengan polisi dan TNI memegang kendali utama, sehingga kebebasan masyarakat untuk berekspresi menjadi sangat terbatas.³⁹ Presiden Soeharto juga punya cara untuk menekan para aktivis yang

³³ Jo, H. (2018, Februari 28). *Jilbab Terlarang di Era Orde Baru*. Historia | Media Sejarah Populer. <https://historia.id/kultur/articles/jilbab-terlarang-di-era-orde-baru-6k4Xn/page/1>

³⁴ BBC News Indonesia. (2011, April 7). *Pengakuan negara atas Kong Hu Cu*. BBC News Indonesia. https://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2011/04/110407_agamakong

³⁵ Amindoni, A. (2018, May 20). *Penganut Ahmadiyah dipersekusi lagi, penegakan hukum tumpul?* BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44189085>

³⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia. (2022, September 9). *Mengurai Polemik Penolakan Pendirian Gereja di Cilegon*. <https://kemenag.go.id/opini/mengurai-polemik-penolakan-pendirian-gereja-di-cilegon-jr7bvt>

³⁷ Adryamarthanino, V., & Nailufar, N. N. (2021, Juli 30). *Konflik Ambon 2001: Latar Belakang, Dampak, dan Penyelesaian* Halaman all. *Kompas.Com*. <https://www.kompas.com/stori/read/2021/07/30/110000479/konflik-ambon-2001-latar-belakang-dampak-dan-penyelesaian?page=all>

³⁸ Andrian, N., & Arjanto, D. (2024, Februari 18). *Kilas Balik 23 Tahun Tragedi Kerusuhan Sampit Kalimantan Tengah*. *Tempo*. <https://www.tempo.co/politik/kilas-balik-23-tahun-tragedi-kerusuhan-sampit-kalimantan-tengah--86097>

³⁹ Obet, R. (2024, Februari 20). *Tantangan Kebebasan Berpendapat dari Masa ke Masa*. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga. <https://fib.unair.ac.id/fib/2024/02/20/tantangan-kebebasan-berpendapat-dari-masa-ke-masa/>

vokal terhadap kebijakan di era orde baru, yaitu menuduhnya berbuat makar atau menggulingkan pemerintahan yang sah bahkan dianggap kelahiran kembali Partai Komunis Indonesia. Hal ini dialami oleh Budiman Sudjatmiko, Petrus Hariyanto, dan kawan-kawannya di Partai Rakyat Demokratik (PRD).⁴⁰ Pengkritik orde baru juga akan terkena pidana berdasarkan Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi.

Bagian ini yang paling mengerikan, aktivis di era orde baru terancam dihilangkan tanpa jejak. Pada era orde baru, populer di kalangan masyarakat nomenklatur Petrus atau Penembak Misterius. Sementara itu, tercatat masih ada 13 orang yang berstatus hilang imbas represi politik era tahun 1997-1998 termasuk Wiji Thukul. Ada juga selain mereka yang dilepaskan. Mereka yang berhasil ditemukan tak bernyawa, kebanyakan memiliki bekas luka karena dianiaya.⁴¹

Belum ada pengadilan terhadap pelanggaran HAM di era orde baru yang dapat memberikan kejelasan terhadap kasus-kasus yang ada. Hingga saat ini, para keluarga korban masih mencari keadilan. Setiap Kamis sore sejak 18 Januari 2007, para aktivis dan keluarga korban terus menuntut haknya untuk penuntasan kasus HAM di Indonesia.

Di era reformasi, kebebasan berpendapat mulai diperluas kebebasannya. Upaya ini dapat dilihat pada Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, kemudian juga dalam Undang-undang (UU) Nomor 26 Tahun 1999 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 11/PNPS/Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi.

Implementasi penegakan Hak Asasi Manusia di era reformasi juga bukan tanpa rapor merah. Banyak kasus pelanggaran HAM yang diduga terdapat andil pemerintah, seperti diracunnya Munir dalam perjalannya ke Belanda pada tahun 2004.⁴² Serta pada tahun 2017, teror penyiraman air keras kepada penyidik KPK, Novel Baswedan,⁴³ dan masih banyak lagi.

Institusi Hak Asasi Manusia

Orde baru sama sekali tak memberi ruang kepada pembentukan lembaga hak asasi manusia, justru sebaliknya, banyak pelanggaran Hak Asasi Manusia di era orde baru, yang salah satu faktornya juga karena belum adanya pelembagaan terhadap lembaga HAM.

Sebaliknya, Reformasi menciptakan lembaga-lembaga seperti Komnas HAM dan Mahkamah Konstitusi yang berperan signifikan dalam memastikan perlindungan HAM. Hal ini memperkuat posisi hukum sebagai alat keadilan bagi masyarakat.⁴⁴ Upaya ini tentu didukung dengan landasan hukum yang kuat, pembuatan Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sangat berpengaruh terhadap penegakan HAM di era reformasi.

Sistem Pemerintahan dan Pemilihan Umum

⁴⁰ Saptohutomo, A. P. (2023, Juli 26). Kala Para Aktivis Diburu dan Dicap "PKI" Usai Kerusuhan 27 Juli 1996... Halaman all. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2023/07/27/05150031/kala-para-aktivis-diburu-dan-dicap-pki-usai-kerusuhan-27-juli-1996-?page=all>

⁴¹ Nailufar, N. N. (2021, Oktober 28). Daftar Aktivis yang Diculik dan Hilang Tahun 1997/1998. Kompas.Com. <https://www.kompas.com/stori/read/2021/10/28/080000779/daftar-aktivis-yang-diculik-dan-hilang-tahun-1997-1998>

⁴² Nurani, S. K., Andryanto, S. D. (2024, September 8). 20 Tahun Pembunuhan Munir, Kronologi Kematian Aktivis HAM Akibat Racun Arsenik di Pesawat. Tempo. <https://www.tempo.co/hukum/20-tahun-pembunuhan-munir-kronologi-kematian-aktivis-ham-akibat-racun-arsenik-di-pesawat-11704>

⁴³ Muhid, H. K., & Andryanto, S. D. (2024, April 12). 7 Tahun Lalu Penyidik Senior KPK Novel Baswedan Disiram Air Keras, Ini Kronologi Teror yang Dihadapinya. Tempo. <https://www.tempo.co/hukum/7-tahun-lalu-penyidik-senior-kpk-novel-baswedan-disiram-air-keras-ini-kronologi-teror-yang-dihadapinya-68603>

⁴⁴ Nazril, M. M., Juliandi, D., Hikmah, L. J., Nabela, Nazmah, F., & Putera, M. L. S. (2024, Oktober). Implementasi Hukum HAM di Indonesia: Tantangan dan Solusi. *Perspektif Administrasi Publik dan Hukum*, 1(4), 1 - 15. <https://doi.org/10.62383/perspektif.v1i3.42>

Di era orde baru, terdapat suatu hal unik, yaitu sistem presidensial namun pelaksanaannya malah mirip dengan sistem parlementer, di mana presiden dipilih oleh Parlemen atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kekuasaan tertinggi pun berada di bawah MPR, berbeda dengan reformasi setelah Amandemen Undang-Undang Dasar, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Setelah reformasi, pemilihan presiden dipilih langsung oleh rakyat. Tepatnya di tahun 2004, setelah di amandemen UUD 1945 pada tahun 2001, di pasal Pasal 6A Ayat (1) UUD menyebutkan, presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Lalu ini diejawantahkan dan diperjelas pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 5 Ayat (4) UU tersebut mengatur bahwa pencalonan presiden dan wakil presiden hanya dapat dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh minimal 15 persen kursi DPR atau 20 persen suara sah secara nasional dalam pemilu DPR. Selanjutnya, pasangan calon presiden dan wakil presiden akan dinyatakan menang jika memperoleh lebih dari 50 persen suara dalam pemilu presiden, dengan syarat minimal 20 persen suara di setiap provinsi, tersebar di lebih dari setengah total provinsi di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Ayat (2) UU Pemilu. Jika tidak ada pasangan calon yang memenuhi ketentuan tersebut, maka pemilu presiden putaran kedua dilaksanakan, dengan memilih dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pada putaran pertama secara langsung oleh rakyat.

Mahkamah Konstitusi

Pada masa Orde Baru, Indonesia tidak memiliki Mahkamah Konstitusi (MK) sebagaimana yang ada sekarang. Pemerintahan Orde Baru, yang dimulai pada tahun 1966 di bawah Presiden Soeharto, lebih mengandalkan lembaga-lembaga yang sudah ada, seperti Mahkamah Agung (MA) dan lembaga legislatif yang berada di bawah kontrol pemerintah. Penegakan konstitusi dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah tidak dilakukan secara terpisah oleh lembaga yang independen, sehingga banyak kebijakan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi atau ketatanegaraan yang seharusnya.

Pendirian Mahkamah Konstitusi baru terjadi setelah reformasi, dengan amandemen ketiga terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 2001, yang mengubah struktur dan sistem ketatanegaraan Indonesia. Mahkamah Konstitusi dibentuk dengan tujuan untuk mengawasi konstitusi, termasuk memeriksa undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945, menguji hasil pemilu, dan menangani sengketa hasil pemilu. Sebelum adanya MK, tugas semacam itu tidak dijalankan oleh lembaga independen dan lebih banyak berada di bawah kekuasaan eksekutif atau legislatif.⁴⁵

Dalam hal ini, jelas mahkamah konstitusi merupakan inovasi perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang sangat berguna bagi kehidupan masyarakat. Mahkamah Konstitusi memberikan masyarakat akses untuk menyuarakan perubahan pada Undang-Undang yang mengandung kecacatan yang merugikan hidup masyarakat, baik cacat materiil maupun cacat formil.

Penerapan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Prinsip-Prinsip Demokrasi di Era Reformasi: Dampak Positif dan Tantangan bagi Stabilitas Sosial dan Politik di Indonesia

Penerapan hak asasi manusia (HAM) dan prinsip-prinsip demokrasi di era Reformasi membawa dampak positif yang signifikan bagi Indonesia, namun juga menimbulkan tantangan besar terhadap stabilitas sosial dan politik. Secara positif, era Reformasi membuka ruang bagi kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan penguatan lembaga-lembaga demokrasi yang sebelumnya terkekang di masa Orde Baru. Demokratisasi ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam proses politik, baik melalui pemilu yang lebih bebas maupun dengan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik. Namun, di sisi lain, tantangan yang muncul adalah ketegangan sosial yang lebih terbuka, akibat meningkatnya pluralisme politik dan perbedaan pandangan yang semakin intens. Penerapan

⁴⁵ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (n.d.). *Sejarah Dan Perkembangan*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1&menu=2>

hak-hak dasar seperti kebebasan berekspresi sering kali berujung pada konflik, termasuk konflik identitas, agama, dan etnis, yang mempengaruhi stabilitas sosial. Selain itu, meskipun prinsip HAM lebih ditegakkan, masih ada praktik pelanggaran hak yang terjadi, seperti kasus kekerasan terhadap kelompok minoritas dan korupsi yang terus menjadi masalah besar. Dengan demikian, meskipun kemajuan besar dicapai, penerapan HAM dan demokrasi juga memunculkan tantangan yang mempengaruhi keseimbangan antara kebebasan dan stabilitas politik di Indonesia.⁴⁶

Faktor yang Menyebabkan Perbedaan Pendekatan Keamanan Nasional antara Orde Baru dan Reformasi, dan Bagaimana Hal ini Memengaruhi Keamanan dan Konflik Sosial di Masyarakat

Perbedaan pendekatan keamanan nasional antara Orde Baru dan Reformasi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur politik dan sosial di masing-masing era. Pada masa Orde Baru, di bawah kepemimpinan Soeharto, pendekatan keamanan nasional sangat sentralistik dan militeristik. Hal ini tentu didorong oleh sejumlah faktor historis, sosial, dan politik yang membentuk pemerintahan Orde Baru.

Pada awal 1960-an, Indonesia berada dalam situasi yang sangat tidak stabil, dengan ketegangan politik yang tinggi dan konflik internal yang melibatkan militer, Partai Komunis Indonesia (PKI), serta kelompok-kelompok lainnya. Dalam konteks ini, Soeharto melihat otoritarianisme sebagai cara untuk mengatasi krisis politik dan mengembalikan stabilitas. Dia mengambil kendali atas militer dan menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno melalui "Supersemar" pada tahun 1966, yang memberi Soeharto wewenang penuh.

Kebijakan Soeharto kemudian berfokus pada pembangunan ekonomi dan sosial, yang menjadikannya populer di kalangan sebagian besar rakyat Indonesia. Namun, untuk menjaga kontrol, Soeharto menerapkan sistem politik yang sangat sentralistik dan membatasi kebebasan berpendapat. Dengan menyingkirkan partai politik yang mengancam kekuasaannya, serta memperkenalkan asas tunggal dan membatasi oposisi, Soeharto memperkuat posisi otoriterinya. Keputusan-keputusan ini didasarkan pada keyakinannya bahwa stabilitas negara dan kemajuan ekonomi hanya bisa dicapai melalui kontrol yang kuat dari pemerintah pusat dan militer.⁴⁷

Pemerintah orde baru mengutamakan stabilitas politik dan ekonomi melalui kontrol ketat terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk melalui dwifungsi ABRI yang memperkuat peran militer dalam pemerintahan dan pengawasan sosial. Pendekatan ini cenderung represif dan mengekang kebebasan berpendapat, dengan pembatasan terhadap oposisi politik dan kebebasan pers. Hal ini menciptakan kondisi di mana konflik sosial sering kali ditanggapi dengan kekerasan atau penindasan yang dapat mengekang potensi terjadinya perubahan.

Berbeda dengan itu, era Reformasi yang dimulai pada tahun 1998 membawa perubahan besar dalam sistem politik dan pendekatan terhadap keamanan nasional. Pasca-reformasi, Indonesia mengarah pada demokratisasi dengan penekanan pada hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, dan partisipasi politik yang lebih luas. Meskipun masih menghadapi tantangan dalam menjaga stabilitas, pendekatan ini berusaha mengurangi dominasi militer dalam kehidupan politik dan lebih menekankan pada pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis pada hukum. Namun, meskipun lebih demokratis, reformasi juga membawa ketidakpastian yang berpotensi menambah ketegangan sosial, seperti meningkatnya kebebasan berekspresi yang terkadang memicu konflik identitas, etnis, dan agama. Secara keseluruhan, meskipun pendekatan keamanan nasional di era Reformasi lebih mengutamakan penegakan hukum dan hak asasi manusia, proses demokratisasi ini juga membuka peluang bagi timbulnya konflik sosial yang lebih beragam.

KESIMPULAN

⁴⁶ FISIB Universitas Pakuan. (2020, Juli 16). Tantangan Demokrasi di Indonesia. <https://fisib.unpak.ac.id/berita/tantangan-demokrasi-di-indonesia>

⁴⁷ Farchan, Y. (2022, Januari 20). Dinamika Sistem Politik Otoritarianisme Orde Baru. *Jurnal Adhikari*, 1(3), 152 - 161.

Kesimpulan jurnal ini menyoroti perbedaan implementasi kebijakan dan dampaknya pada berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia antara era Orde Baru dan Reformasi. Pada masa Orde Baru, fokus utama adalah stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi melalui sentralisasi kekuasaan, yang menghasilkan pembangunan signifikan tetapi sering mengorbankan hak asasi manusia dan pemerataan. Sebaliknya, era Reformasi membawa desentralisasi, penguatan demokrasi, dan penghormatan terhadap HAM, meski diiringi tantangan seperti lemahnya kualitas pendidikan politik, fragmentasi kepartaian, dan konflik sosial.

Dari segi kebijakan sosial, Reformasi menghadirkan program yang lebih inklusif, seperti BPJS Kesehatan dan BOS, yang memperbaiki akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Namun, tantangan dalam implementasi dan pemerataan tetap menjadi kendala. Dalam sistem politik, Orde Baru cenderung represif dengan kontrol ketat terhadap kebebasan berpendapat dan pers, sedangkan Reformasi membuka ruang kebebasan yang lebih luas, meski sering disalahgunakan dan kurang bertanggung jawab.

Transformasi besar juga terjadi dalam sistem pemerintahan, dari pemilihan presiden oleh MPR pada era Orde Baru ke pemilihan langsung oleh rakyat di era Reformasi. Secara keseluruhan, jurnal ini menunjukkan bahwa meskipun Reformasi membawa perubahan signifikan ke arah demokrasi dan penghormatan HAM, masih ada tantangan struktural dan sosial yang perlu diatasi untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Hadi, S., Widjajanto, A., Utomo, R. P., Rochayati, N., Supriyanto, A., S. M., & Addinata, W. (2007). *Disintegrasi Pasca Orde Baru: Negara, Konflik Lokal dan Dinamika Internasional*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia., 2007.
https://perpustakaan.komnasperempuan.go.id/web/index.php?p=show_detail&id=1216

Soekanto, S. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No. 11 Tahun 1966 tentang Pokok Pers.

Undang-Undang No. 21 Tahun 1982 tentang Surat Izin Usaha Percetakan dan Penerbitan (SIUPP).

Undang-undang (UU) Nomor 26 Tahun 1999 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 11/PNPS/Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi.

Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.

Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi.

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No. 052/C/Kep/D/1982 tentang Pedoman Pakaian Seragam Sekolah di Siswa Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Tingkat Atas dalam Lingkungan Pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

ARTIKEL JURNAL

Farchan, Y. (2022, Januari 20). Dinamika Sistem Politik Otoritarianisme Orde Baru. *Jurnal Adhikari*, 1(3), 152 - 161.

Hutagalung, I. (2013). Dinamika Sistem Pers di Indonesia. *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(2), 156–163. <https://doi.org/10.14710/interaksi.2.2> 156-163

Mursal, I. F., & Wita, G. (2021, Februari). MAJALAH SABILI: TRANSISI ORDE BARU KE REFORMASI (1985-2000). MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial, 5(1), 111 - 122. : <https://doi.org/10.30743/mkd.v5i1.3503>

Nazril, M. M., Juliandi, D., Hikmah, L. J., Nabela, Nazmah, F., & Putera, M. L. S. (2024, Oktober). Implementasi Hukum HAM di Indonesia: Tantangan dan Solusi. *Perspektif Administrasi Publik dan Hukum*, 1(4), 1 - 15. <https://doi.org/10.62383/perspektif.v1i3.42>

Octavia, N. N. (2022, September 8). "TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PERBANDINGAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DI ERA ORDE BARU DAN REFORMASI (Studi Perencanaan Pembangunan Model Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Dan Model Rancangan Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN))." *Repository IAIN Bengkulu*. Diakses November 18, 2024. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/9968/>.

Pramono, S. (2018, Januari 1), "Peranan Negara Dalam Pembangunan Perbandingan Antara Kebijakan Pemerintahan Orde Baru Dengan Pemerintahan Orde Reformasi." Diakses November 18, 2024. <http://repository.unitomo.ac.id/1440/>.

Pujiati, P. (2023). Perbandingan Dinamika Penggunaan Jilbab di Masa Orde Baru dan Reformasi. *Jurnal Sejarah Indonesia*, 6(2), 135–149. <https://doi.org/10.62924/jsi.v6i2.32604>

Sagita, R. D., Khoiroh, M., Ningrum, V. D. A., Suhaimi, W., & Febriansyah, G. (2024). STUDI PERBANDINGAN UPAYA PEMBERANTASAN DAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI PADA ERA ORDE BARU DAN REFORMASI. *Jurnal Hukum Dan Kebijakan Publik*, 6(3).

Saptohadhi, S. (2011). PASANG SURUT KEBEBASAN PERS DI INDONESIA. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(1), 127–138. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.1.85>

Sunarto. (2018, Januari 1). PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DPR (Perbandingan antara Orde Baru dan Reformasi). *INTEGRALISTIK*, 29(1), 84 - 96. <https://journal.unnes.ac.id/nju/integralistik/article/view/14604/7848>

Yin, J. (2008). Beyond the Four Theories of the Press: A New Model for the Asian & the World Press. *Journalism & Mass Communication Monographs*.

Zafrullah, S. (2008). Dampak sistem multipartai dalam kehidupan politik Indonesia. *Perpustakaan Komisi Pemberantasan Korupsi*.

INTERNET

Adryamarthanino, V., & Nailufar, N. N. (2021, Juli 30). Konflik Ambon 2001: Latar Belakang, Dampak, dan Penyelesaian Halaman all. *Kompas.Com*. <https://www.kompas.com/stori/read/2021/07/30/110000479/konflik-ambon-2001-latar-belakang-dampak-dan-penyelesaian?page=all>

Amindoni, A. (2018, Mei 20). *Penganut Ahmadiyah dipersekusi lagi, penegakan hukum tumpul?* BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44189085>

Andrian, N., & Arjanto, D. (2024, Februari 18). *Kilas Balik 23 Tahun Tragedi Kerusuhan Sampit Kalimantan Tengah.* *Tempo.* <https://www.tempo.co/politik/kilas-balik-23-tahun-tragedi-kerusuhan-sampit-kalimantan-tengah--86097>

Annisa. (2023, Oktober 5). *Penerapan Pancasila Pada Masa Orde baru ,Kelebihan dan Kelemahannya.* Fakultas Hukum UMSU. <https://fahum.umsu.ac.id/penerapan-pancasila-pada-masa-orde-baru-kelebihan-dan-kelemahannya/>

Atillah, R., & Gischa, S. (2023, Oktober 14). *Sistem Multipartai dan Dampaknya.* *Kompas.Com.* <https://www.kompas.com/skola/read/2023/10/14/073000469/sistem-multipartai-dan-dampaknya->

BBC News Indonesia. (2011, April 7). *Pengakuan negara atas Kong Hu Cu.* BBC News Indonesia. https://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2011/04/110407_agamakong

CNN Indonesia. (2024, November 5). *Warga RI Bisa Medical Check Up Gratis 2025 Nanti, Ini Caranya.* *CNN Indonesia.* <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20241105152034-255-1163217/warga-ri-bisa-medical-check-up-gratis-2025-nanti-ini-caranya>

Fauzi, D. R. (2019, Maret 26). *Ironi Partai Politik dalam Pusaran Korupsi – BERITA UPI.* Portal Berita Universitas Pendidikan Indonesia. <https://berita.upi.edu/ironi-partai-politik-dalam-pusaran-korupsi/>

Fiani, P. (2013). *Perbandingan sistem kepartaian di masa orde baru dan pasca reformasi.* Fak. Hukum Universitas Sriwijaya. <https://onesearch.id/Record/IOS4546.slims-4089/Details>

Finaka, A. W., Persada, R. K. B., & Paolo, B. (n.d.). *Masa Pemerintahan BJ Habibie: Reformasi Ekonomi Atasi Krisis.* Indonesia Baik. <https://indonesiabaik.id/infografis/reformasi-ekonomi-atasi-krisis>

FISIB Universitas Pakuan. (2020, Juli 16). *Tantangan Demokrasi di Indonesia.* <https://fisib.unpak.ac.id/berita/tantangan-demokrasi-di-indonesia>

Indonesia Investments. (2024, December 7). *Indonesia Keajaiban Orde Baru - Presiden Suharto.* Indonesia Investments. <https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/ekonomi/keajaiban-orde-baru/item247>

Inspect History (ID). (2023). *Kelebihan dan Kekurangan Pemerintahan Orde Baru!* [Video]. Di *YouTube.* <https://www.youtube.com/watch?v=hKz6t2bJ3GY>

Jo, H. (2018, Februari 28). *Jilbab Terlarang di Era Orde Baru.* *Historia | Media Sejarah Populer.* <https://historia.id/kultur/articles/jilbab-terlarang-di-era-orde-baru-6k4Xn/page/1>

Joesoef, H. M. (2018, November 26). *Yayasan Supersemar.* *Indonesiainside.Id.* <https://indonesiainside.id/narasi/2018/11/26/yayasan-supersemar>

kejarcita. (2023). *Masa Orde Baru dan Masa Reformasi* [Video]. Di *YouTube.* <https://www.youtube.com/watch?v=EvoSuhfLLVQ>

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2022, September 9). Mengurai Polemik Penolakan Pendirian Gereja di Cilegon. <https://kemenag.go.id/opini/mengurai-polemik-penolakan-pendirian-gereja-di-cilegon-jr7bvt>

KontraS : Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. (2024, September 12). 40 Tahun Nestapa Pengabaian Negara terhadap Korban Peristiwa Tanjung Priok 1984. Kontras.Org. <https://kontras.org/media/siaranpers/40-tahun-nestapa-pengabaian-negara-terhadap-korban-peristiwa-tanjung-priok-1984>

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (n.d.). *Sejarah Dan Perkembangan*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1&menu=2>

Muhid, H. K., & Andryanto, S. D. (2024, April 12). 7 Tahun Lalu Penyidik Senior KPK Novel Baswedan Disiram Air Keras, Ini Kronologi Teror yang Dihadapinya. *Tempo*. <https://www.tempo.co/hukum/7-tahun-lalu-penyidik-senior-kpk-novel-baswedan-disiram-air-keras-ini-kronologi-teror-yang-dihadapinya-68603>

Nailufar, N. N. (2021, Oktober 28). Daftar Aktivis yang Diculik dan Hilang Tahun 1997/1998. *Kompas.Com*. <https://www.kompas.com/stori/read/2021/10/28/080000779/daftar-aktivis-yang-diculik-dan-hilang-tahun-1997-1998>

Nurani, S. K., Andryanto, S. D. (2024, September 8). 20 Tahun Pembunuhan Munir, Kronologi Kematian Aktivis HAM Akibat Racun Arsenik di Pesawat. *Tempo*. <https://www.tempo.co/hukum/20-tahun-pembunuhan-munir-kronologi-kematian-aktivis-ham-akibat-racun-arsenik-di-pesawat-11704>

Obet, R. (2024, Januari 26). *Tantangan Jawa-sentrisme: Menuju Keseimbangan Pembangunan*. Fakultas Ilmu Budaya. <https://fib.unair.ac.id/fib/2024/01/26/tantangan-jawa-sentrisme-menuju-keseimbangan-pembangunan/>

Obet, R. (2024, Februari 20). *Tantangan Kebebasan Berpendapat dari Masa ke Masa*. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga. <https://fib.unair.ac.id/fib/2024/02/20/tantangan-kebebasan-berpendapat-dari-masa-ke-masa/>

Opini id. (2019). Orde Baru Soeharto dan Reformasi. Kamu Tim Mana? [Video]. *YouTube*. <https://www.youtube.com/watch?v=KJ6siYPWVYk>

Pos Indonesia. (n.d.). *Resmi Ganti Nama, ULBI Beri Beasiswa Kuliah Gratis Sampai Lulus*. Pos Indonesia. <https://www.posindonesia.co.id/id/articles/detail/resmi-ganti-nama-ulbi-beri-beasiswa-kuliah-gratis-sampai-lulus>

Prabowo, G., & Gischa, S. (2020, November 1). Sistem Kepartaian masa Orde Baru. *Kompas.Com*. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/11/01/142648769/sistem-kepartaian-masa-orde-baru>

Prasetyo, S. (2024, November 9). *Tantangan & Peluang Ekonomi di Era Kepemimpinan Prabowo Gibran*. PINA. <https://pina.id/artikel/detail/tantangan-dan-peluang-ekonomi-di-era-kepemimpinan-prabowo-gibran-l36p4wtv6>

Pusat Data dan Informasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila . (2021, April 15). *Penerapan Pancasila dari Masa ke Masa*. BPIP - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. <https://bpip.go.id/artikel/penerapan-pancasila-dari-masa-ke-masa>

Putri, V. K. M. (2022, November 3). Perkembangan Ekonomi Indonesia pada Masa Reformasi. Kompas.Com.

<https://www.kompas.com/skola/read/2022/11/03/130000269/perkembangan-ekonomi-indonesia-pada-masa-reformasi>

Regar, R. F., & Andryanto, S. D. (2024, Mei 17). Perbedaan Sistem Kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan yang Bakal Diganti dengan KRIS. *Tempo*. <https://www.tempo.co/politik/perbedaan-sistem-kelas-1-2-dan-3-bpjs-kesehatan-yang-bakal-diganti-dengan-kris-58253>

Rianto, M. N. (n.d.). *Refleksi 10 Tahun Perkembangan Ekonomi Era Jokowi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Website Resmi. Dikutip December 16, 2024, dari <https://uinjkt.ac.id/id/refleksi-10-tahun-perkembangan-ekonomi-era-jokowi#:~:text=Selama%20masa%20pemerintahan%20Jokowi%2C%20pertumbuhan,cepat%20pada%20tahun%2Dtahun%20berikutnya>.

RRI. (2024, Oktober 24). Target, Pertumbuhan Ekonomi era Prabowo Jadi 8%. RRI. <https://rri.co.id/bisnis/1066667/target-pertumbuhan-ekonomi-era-prabowo-jadi-8>

Saptohutomo, A. P. (2023, Juli 26). Kala Para Aktivistis Diburu dan Dicap "PKI" Usai Kerusuhan 27 Juli 1996... Halaman all. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2023/07/27/05150031/kala-para-aktivis-diburu-dan-dicap-pki-usai-kerusuhan-27-juli-1996-?page=all>

Thabrany, H. (2014, Oktober 31). Transformasi Wajah Jaminan Kesehatan. *Cnn Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20141031163324-21-9143/transformasi-wajah-jaminan-kesehatan>

Trianita, K. (2022, Juni 13). Perjalanan Media Massa dari Orde Baru hingga Reformasi. *Kumparan*. <https://kumparan.com/khoirul-trianita/perjalanan-media-massa-dari-orde-baru-hingga-reformasi-1yEpwHBMYot/full>

